



## Analisis Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Oleh Mahasiswa KESOS USU Stambuk 2021

Eflin Novita Sinaga<sup>1</sup>, Ulina Tassia Hutagaol<sup>2</sup>, Dito Pranata<sup>3</sup>, Berlianti<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Email: [eflinnovita@students.usu.ac.id](mailto:eflinnovita@students.usu.ac.id)<sup>1</sup>, [ulinatassia@students.usu.ac.id](mailto:ulinatassia@students.usu.ac.id)<sup>2</sup>, [ditoprnata83@students.usu.ac.id](mailto:ditoprnata83@students.usu.ac.id)<sup>3</sup>, [berlianti@usu.ac.id](mailto:berlianti@usu.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *The state guarantees citizens' healthcare services as regulated in the Constitution. The Indonesia Health Card (KIS) is a tangible form of the government's effort to realize equitable and easily accessible healthcare quality for all Indonesians. However, the implications of this program have not been evenly distributed, as experienced by students in the social welfare department of Sumatera Utara University class of 2021. KIS is very beneficial for students who are aware of and can access it, but the program's effectiveness is still hindered by uneven information distribution and complex administrative procedures. Recommendations are provided to enhance information dissemination and simplify administrative procedures to ensure the KIS program is more inclusive and easily accessible to all students.*

**Keywords:** KIS, Students, Benefits

**Abstrak.** Negara menjamin pelayanan kesehatan warga negara yang diatur dalam UUD. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah bentuk nyata pemerintah dalam mewujudkan kualitas kesehatan yang merata dan mudah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun implikasi dari program ini belum merata, seperti yang dialami oleh mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial Universitas Sumatera Utara angkatan 2021. KIS sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengetahui dan dapat mengaksesnya, namun efektivitas program masih terhambat oleh distribusi informasi yang tidak merata dan prosedur administrasi yang kompleks. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan menyederhanakan prosedur administrasi guna memastikan program KIS lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua mahasiswa.

**Kata kunci:** KIS, Mahasiswa, Manfaat

### 1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas, serta wajib dijamin oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan Pasal 34(3) Untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program jaminan kesehatan, termasuk Program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan rentan, serta memastikan bahwa mereka mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak tanpa biaya tinggi.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah salah satu program unggulan pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2014 yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk meningkatkan kemudahan dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan memberikan layanan

preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan data jumlah masyarakat yang menggunakan KIS mencapai 275.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk Indonesia yang pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 281.603.800 jiwa yang mencakup berbagai lapisan masyarakat. Direktur utama BPJS kesehatan, Ali Gufron Mukti menerangkan, kepesertaan JKN-KIS dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Peserta program JKN merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja minimal selama enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta program JKN terdiri atas dua kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan PBI (non PBI). Peserta PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI adalah pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya. Iuran Jaminan kesehatan untuk peserta pekerja penerima upah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja sendiri sedangkan iuran peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja) dibayarkan oleh peserta sendiri kepada BPJS Kesehatan sesuai kelas perawatannya (Kemenkes RI, 2014).

Undang-undang menerangkan bahwa setiap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang menetap di Indonesia lebih dari enam (6) bulan diwajibkan untuk mengikuti jaminan sosial kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Itu berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.

Program KIS tidak hanya berfokus pada layanan kuratif, tetapi juga preventif, promotif, dan rehabilitatif, sehingga memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan cakupan yang sangat luas, program ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam golongan ekonomi rendah. KIS juga berperan penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Meskipun KIS telah berjalan selama hampir satu dekade, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah pemanfaatan KIS di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Kesejahteraan Sosial (Kesos) Universitas Sumatera Utara (USU) stambul 2021. Mahasiswa merupakan kelompok yang unik karena mereka berada dalam masa transisi dari remaja menuju dewasa dan sering kali memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dengan kelompok usia lainnya. Pemanfaatan KIS oleh mahasiswa Kesos USU stambul 2021 perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana program ini telah efektif dalam memberikan manfaat dan akses kesehatan yang diperlukan oleh mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan KIS oleh mahasiswa Kesos USU stambuk 2021, mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan KIS oleh mahasiswa, diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perbaikan dan pengembangan program kesehatan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara stambuk 2021 dalam memanfaatkan KIS untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling

yaitu mahasiswa yang merupakan penerima manfaat KIS. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk menggali informasi terkait pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan KIS.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada 5 mahasiswa kesejahteraan sosial stambuk 2021 terdapat 2 dari 5 mahasiswa yang tidak mengetahui sama sekali tentang KIS bahkan baru mendengar tentang program dari pemerintah ini. Mahasiswa lain yang menjadi informan kami mengaku sangat tahu tentang penggunaan dan manfaat KIS. Alasan tidak menggunakan KIS yang dituturkan oleh 2 mahasiswa tersebut adalah kurangnya informasi. Mereka mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai manfaat dan prosedur penggunaan KIS. Informasi mengenai cakupan layanan yang bisa diperoleh dengan KIS juga dianggap kurang jelas.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Edi Suharto (2005) yang menyatakan bahwa keberhasilan program kebijakan sosial bergantung pada sejauh mana aksesibilitas informasi diberikan kepada masyarakat. Ketika akses informasi terbatas, penerima manfaat potensial, seperti mahasiswa, tidak dapat sepenuhnya mengoptimalkan manfaat dari program yang telah dirancang. Informasi yang terbatas ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara rancangan program KIS di tingkat kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Jika sosialisasi tidak dirancang dengan baik, terutama di kelompok yang sangat membutuhkan layanan ini seperti mahasiswa, maka tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara maksimal.

Manfaat yang dirasakan bagi mahasiswa yang memanfaatkan KIS adalah pengurangan biaya untuk layanan kesehatan seperti konsultasi dokter umum, pembelian obat dan layanan rawat inap. Narasumber juga menyatakan bahwa KIS membantu mereka dalam mendapatkan layanan preventif seperti vaksinasi. Hal ini mencerminkan fungsi *protection* dari kebijakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2014), yaitu kebijakan sosial dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup, seperti ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan finansial. Dalam konteks mahasiswa, KIS menjadi instrumen penting untuk mendukung kesehatan mereka sebagai modal utama untuk menjalani proses pendidikan. Namun, dampak positif ini hanya dirasakan oleh mereka yang telah mendapatkan informasi yang cukup tentang KIS. Hal ini kembali menekankan bahwa manfaat program jaminan sosial, seperti KIS, hanya akan optimal jika didukung dengan upaya pendistribusian informasi yang merata kepada masyarakat.

Penggunaan KIS ini tentu sangat bermanfaat dan membantu, tetapi ada kendala yang dihadapi oleh mahasiswa saat menggunakan KIS. Mahasiswa setuju bahwasannya kesulitan yang pernah mereka alami dalam penggunaan KIS adalah proses administrasi yang rumit. Mahasiswa merasa bahwa prosedur administrasi untuk menggunakan KIS di fasilitas kesehatan cukup rumit dan memakan waktu. Mereka sering kali harus mengisi berbagai formulir dan memenuhi persyaratan administratif yang dianggap merepotkan. Hal tersebut sejalan dengan Suharto (2014) menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi dalam kebijakan sosial agar manfaat program dapat diakses dengan lebih mudah oleh penerima. Kompleksitas administrasi seperti ini dapat menjadi hambatan struktural dalam pelaksanaan program sosial. Hambatan administrasi yang dirasakan mahasiswa pengguna KIS menunjukkan bahwa program ini masih terlalu birokratis, sehingga tidak inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Mahasiswa, yang cenderung memiliki waktu terbatas, akan lebih kesulitan memenuhi prosedur yang berbelit-belit dibandingkan kelompok usia lain yang mungkin lebih fleksibel dalam mengurus administrasi.

Kendala yang dialami oleh mahasiswa pengguna KIS menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan KIS terkadang kurang memadai. Mereka mengeluhkan tentang waktu tunggu yang lama, sikap tenaga medis yang kurang ramah, dan keterbatasan fasilitas medis yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun KIS bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata, pelaksanaannya di tingkat fasilitas kesehatan masih memiliki banyak kekurangan. Edi Suharto (2005) menyatakan bahwa kebijakan sosial tidak hanya harus

merespon kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kualitas layanan yang diberikan. Ketika kualitas pelayanan kesehatan yang didukung KIS tidak optimal, kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan menurun. Masalah kualitas layanan, seperti waktu tunggu yang lama dan sikap tenaga medis yang kurang profesional, menunjukkan bahwa implementasi KIS masih memiliki celah besar yang harus diperbaiki. Untuk menjadikan KIS sebagai program yang benar-benar memberdayakan masyarakat, aspek pelayanan harus menjadi prioritas pembenahan, termasuk pengawasan terhadap standar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan KIS.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, mahasiswa memberikan beberapa saran untuk meningkatkan pemanfaatan KIS. Peningkatan sosialisasi, kegiatan ini perlu dilakukan lebih intensif dan jelas mengenai manfaat dan cara penggunaan KIS, khususnya di kalangan mahasiswa. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk penggunaan KIS di fasilitas kesehatan akan sangat membantu dalam meningkatkan pemanfaatan program ini. Terakhir mahasiswa menyarankan adanya peningkatan kualitas layanan yang bekerjasama dengan KIS, termasuk tenaga medis untuk memberikan layanan yang lebih ramah agar para pengguna KIS tidak merasa terintimidasi dan merasa rendah.

Saran tersebut sejalan dengan dengan teori Suharto (2005), yang menekankan pentingnya aspek *empowerment* dalam kebijakan sosial, yaitu memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk merasa dihargai dan diberdayakan melalui layanan yang berkualitas dan inklusif. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas KIS, pemerintah harus memperkuat kebijakan dengan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan persepsi penerima manfaat, sehingga program ini benar-benar mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh mahasiswa Kesejahteraan Sosial stambuk 2021 dapat disimpulkan bahwa program Kartu Indonesia Sehat (KIS) memiliki manfaat yang signifikan bagi beberapa mahasiswa, terutama dalam mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan seperti konsultasi dokter, pembelian obat, layanan rawat inap, serta mendukung layanan preventif seperti vaksinasi. Namun, pemanfaatan program ini belum merata akibat kurangnya informasi yang diterima oleh sebagian mahasiswa, serta kendala dalam proses administrasi dan kualitas layanan kesehatan.

Kurangnya pengetahuan tentang KIS di kalangan mahasiswa menunjukkan adanya kelemahan dalam sosialisasi program. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif

dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan informasi mengenai manfaat dan prosedur penggunaan KIS tersampaikan dengan baik. Kendala administratif yang dirasakan mahasiswa juga menjadi penghalang dalam pemanfaatan KIS, menunjukkan bahwa kebijakan ini masih terlalu birokratis. Selain itu, keluhan terkait kualitas layanan, seperti waktu tunggu yang lama, sikap tenaga medis yang kurang ramah, dan keterbatasan fasilitas medis, menegaskan perlunya peningkatan kualitas pelayanan yang bekerja sama dengan KIS.

Dalam perspektif teori kebijakan sosial Edi Suharto, program seperti KIS harus mencakup elemen *protection*, *empowerment*, dan *promotion*. Kebijakan ini tidak hanya perlu melindungi masyarakat dari risiko sosial, tetapi juga memberdayakan penerima manfaat melalui layanan yang inklusif, mudah diakses, dan berkualitas. Oleh karena itu, rekomendasi seperti peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan perbaikan kualitas layanan kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan KIS dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk mahasiswa. Maka dalam hal ini, diharapkan KIS dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Asyhadie, Z. (2008). *Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Siahaan, S. (2018). Faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik: Memahami kebijakan sosial sebagai upaya mensejahterakan masyarakat*. Alfabeta.